

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu diadakan kegiatan pembangunan. Tujuan dari pembangunan suatu negara adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk yang dapat diukur dengan kenaikan pendapatan riil per kapita. Pendapatan riil per kapita adalah pendapatan nasional riil atau *output* keseluruhan yang dihasilkan satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk akan tercapai jika *output* total meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk (Mulyani, 2017:45).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya *output* total suatu perekonomian adalah penduduk dan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat meminimalisir masalah pengangguran yang muncul akibat imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Kuncoro dalam Konadi, 2014).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mencatat berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa di mana lebih dari 17% dari total penduduk Indonesia tersebar di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk yang sangat besar ini menimbulkan tingkat angkatan kerja yang tinggi, yang berarti penawaran tenaga kerja juga tinggi. Penawaran tenaga kerja yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang tersedia akan memicu masalah pengangguran. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009).

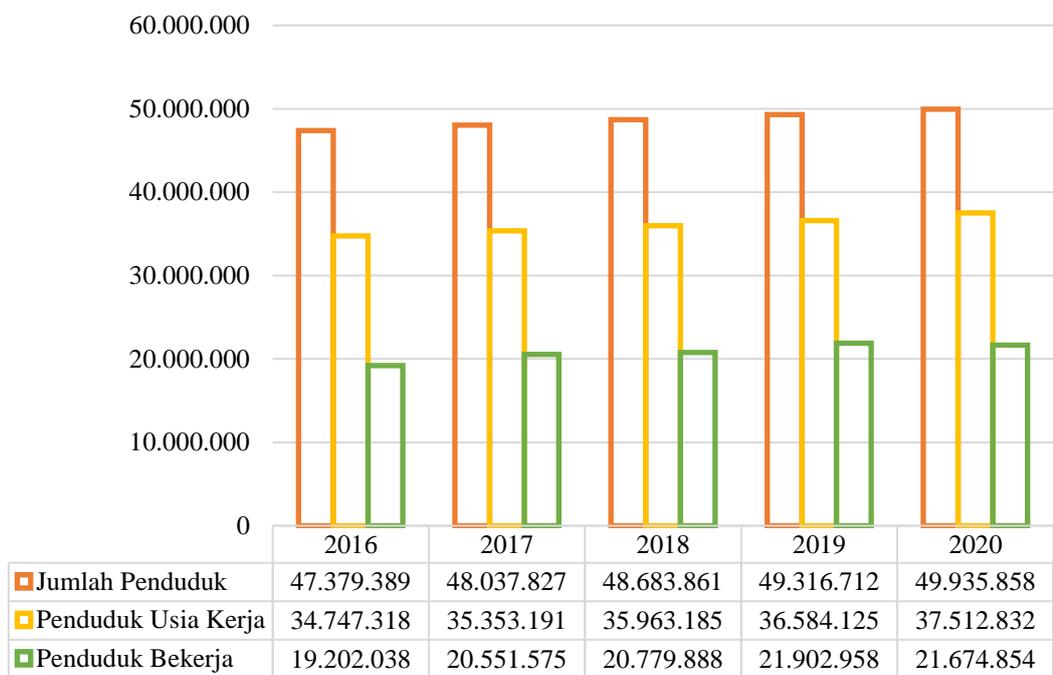
Tabel 1.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)

Tahun	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DI. Yogyakarta.
2016	8,92	6,12	8,89	4,63	4,21	5,61
2017	9,28	7,14	8,22	4,57	4,00	3,02
2018	8,47	6,24	8,23	4,47	3,99	3,35
2019	8,11	6,22	8,04	4,44	3,92	3,14
2020	10,64	10,95	10,46	6,48	5,84	4,57
Rata-rata	9,08	7,33	8,78	4,92	4,32	3,94

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020 terlihat bahwa rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat dua tertinggi sebesar 8,78% dan

pada peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata TPT 9,08%. Bahkan, pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga TPT tertinggi provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta diperingkat pertama dan Provinsi Banten diperingkat ketiga. Kenaikan TPT Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 terjadi sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan salah satunya sektor ekonomi, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai salah satu cara untuk bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, dan Penduduk Bekerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Data pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk, penduduk usia kerja, dan penduduk bekerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020. Berdasarkan data pada gambar 1.1 tersebut, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah

penduduk Provinsi Jawa Barat mencapai 47,37 juta jiwa dan meningkat 1.39% pada tahun 2017 menjadi 48,04 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk kembali meningkat sebesar 1.34% menjadi 48,68 juta jiwa. Begitu pula pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk terus meningkat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk meningkat 1.31% menjadi 49,32 juta jiwa dan pada tahun 2020 meningkat 1,24% menjadi 49,94 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk secara otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1 membuktikan bahwa jumlah penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan jumlah penduduk yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat adalah 34,74 juta jiwa yang meningkat sebesar 1.74% pada tahun 2017 menjadi 35,35 juta jiwa. Begitu pula dengan tahun 2018 dan tahun 2019 yang kembali mengalami peningkatan masing-masing 1.72% atau sebesar 35,96 juta jiwa dan meningkat 1.73% atau sebesar 36,58 juta jiwa. Sementara itu pada tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yakni meningkat 2.54% atau sebesar 37,51 juta jiwa. Peningkatan penduduk usia kerja akan lebih baik jika diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja akan lebih optimal dan dapat meningkatkan *output* nasional.

Meskipun jumlah penduduk usia kerja terus mengalami peningkatan tetapi jumlah tersebut belum dapat menyeimbangi tingginya pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tersedia setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk bekerja yang terserap sebesar 19,20 juta jiwa meningkat 2,18% dari tahun sebelumnya.

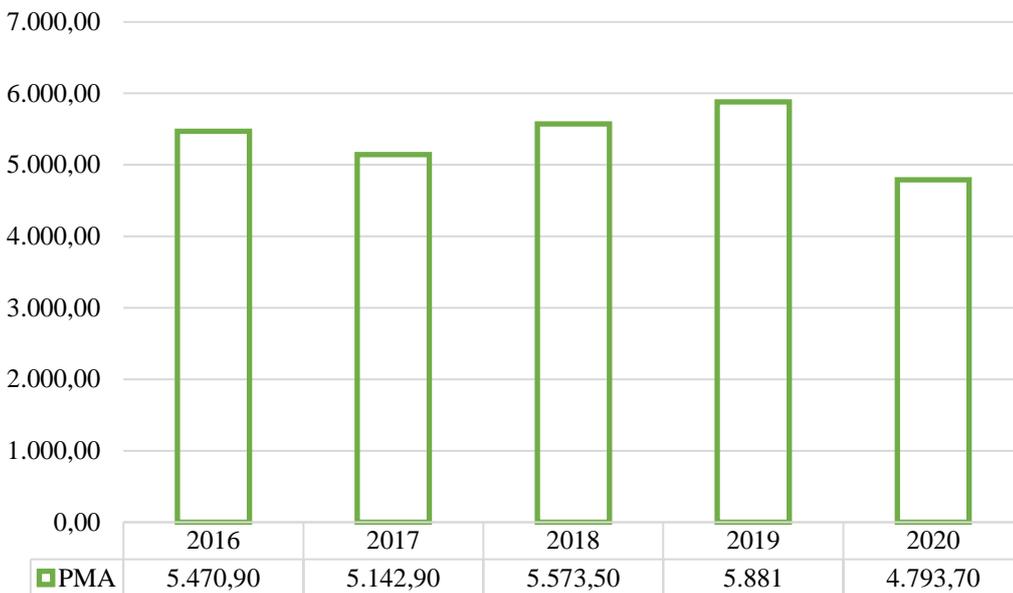
Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penduduk bekerja yang terserap meningkat 7,03% atau sebesar 20,55 juta jiwa. Jumlah penduduk bekerja yang terserap terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018 penduduk bekerja naik 1,11% menjadi 20,77 juta jiwa begitu pula dengan tahun 2019 yang mengalami peningkatan cukup tinggi yakni 5,40% yakni sebesar 21,90 juta jiwa. Jumlah penduduk bekerja selalu mengalami peningkatan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhannya kenaikannya tidak terlalu baik. Sayangnya, pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan -1,04% dari tahun sebelumnya menjadi 21,67 juta jiwa. Hal ini tentu bukan hal yang baik apabila dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan jumlah penduduk usia kerja yang mengalami kenaikan pada tahun 2020.

Penawaran tenaga kerja apabila tidak diiringi dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru maka akan mengakibatkan sebagian penduduk usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Adanya angka pengangguran dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, karena dapat menghambat proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka, diperlukannya perluasan penyerapan tenaga kerja salah satu caranya adalah dengan terciptanya banyak lapangan pekerjaan baru dengan adanya investasi.

Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu mendongkrak perekonomian suatu daerah. Investasi bisa berupa penanaman modal untuk membuka usaha baru, memperluas usaha atau menambah kapasitas serta menambah jumlah aktivitas barang dan jasa yang akan menyerap banyak tenaga kerja serta menambah peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat. Investasi di

suatu negara dapat bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kedua investasi memiliki tujuan yang sama-sama meningkatkan perekonomian bangsa dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan banyaknya investasi akan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sehingga investasi akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita penduduk daerah. Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA), keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dumairy, 1996:130).

Berdasarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2020 secara akumulatif data realisasi investasi, Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi favorit untuk berinvestasi dengan total realisasi investasi sebesar Rp120,4 triliun (14,6%). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat menjadi penerima investasi PMA tertinggi di Indonesia dengan total investasi sebesar 4.793,7 (Juta US\$).

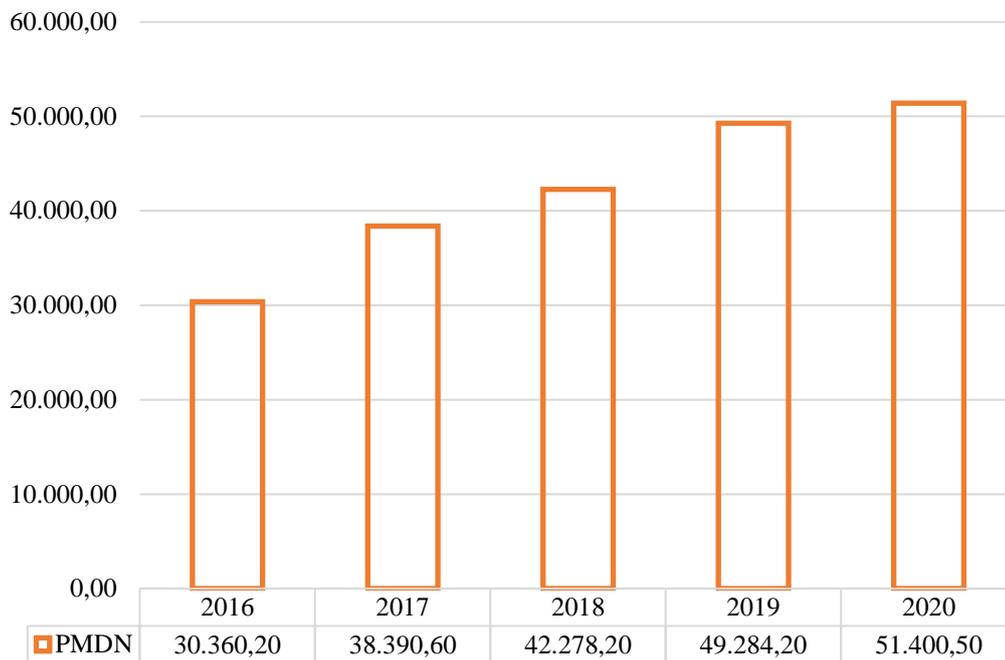


Gambar 1.2 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta US\$)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Data pada gambar 1.2 menunjukkan perkembangan realisasi PMA di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang cenderung fluktuatif dan kurang stabil. Pada tahun 2016 jumlah PMA sebesar 5.470,9 (Juta US\$) dan menurun pada tahun 2017 menjadi 5.142,9 (Juta US\$) dikarenakan adanya pemerataan infrastruktur. Kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan masing-masing 5.573,3 (Juta US\$) dan 5.881 (Juta US\$). Pandemi COVID-19 berdampak terhadap realisasi investasi PMA sehingga pada tahun 2020 PMA di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 4.793,7 (Juta US\$).

Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (2020) walaupun nilainya menurun namun dari sisi realisasi secara nasional dipastikan Provinsi Jawa Barat melebihi target yang dibebankan oleh pusat. Penurunan datang dari PMA tetapi PMDN menjadi penyelamat investasi di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2020.



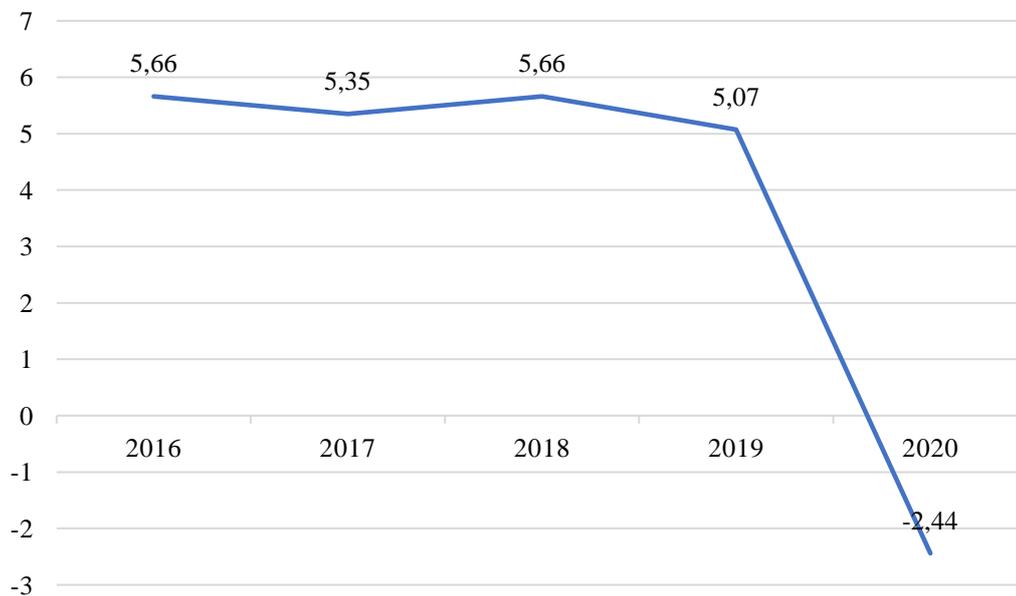
Gambar 1.3 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Data pada gambar 1.3 menunjukkan perkembangan realisasi PMDN di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang stabil dan cukup baik terlihat dari jumlahnya yang selalu meningkat. Pada tahun 2016 jumlah PMDN di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp30.360,20 miliar dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp51.400,50 miliar. Walaupun pandemi COVID-19 berdampak pada investasi, tetapi jumlah PMDN di Provinsi Jawa Barat pada tahun tersebut tetap meningkat.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau terjadi perubahan struktur ekonomi maupun tidak (Arsyad, 2000:15). Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Tingginya laju pertumbuhan PDRB suatu daerah menggambarkan tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi di daerah tersebut berhasil.



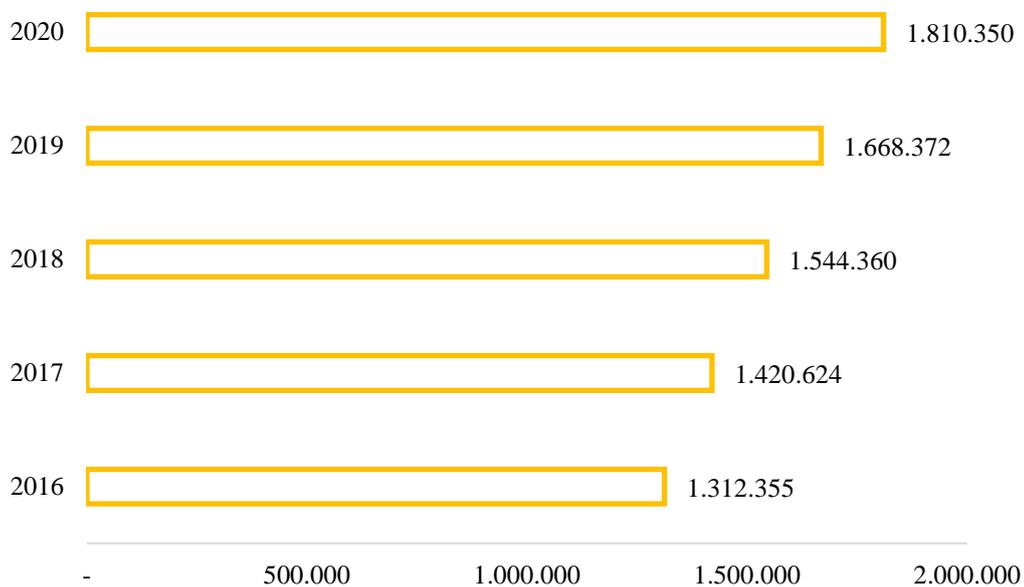
Gambar 1.4 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.4 perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 hingga 2019 terbilang positif walaupun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 5,35%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,07% setelah pada tahun 2018 kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,66%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berkontraksi sebesar -2,44% akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi

di triwulan I-2020 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha.

Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan daerah dan peningkatan *output*. Besarnya kontribusi PDRB yang dimiliki seharusnya memiliki dampak dalam meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi disisi lain juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa membuat kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup pekerja salah satunya dengan tingkat upah yang layak.



Gambar 1.5 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Sumber: BPS, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Gajimu Indonesia (data diolah)

Gambar 1.5 menunjukkan upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Jawa Barat yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016

UMP Jawa Barat sebesar Rp1.312.355,00 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp1.420.624,00 Tahun 2018 UMP Jawa Barat kembali meningkat menjadi sebesar Rp1.544.360,00 dan pada dua tahun berikutnya terus mengalami peningkatan masing-masing tahun 2019 sebesar Rp1.668.372,00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.810.350,00.

Kenaikan upah minimum menjadi hal yang positif karena dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja guna memperlancar daya belinya dan akan mendorong semangat serta memotivasi untuk lebih produktif. Tetapi disisi lain pihak pengusaha justru berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan jika upah minimum meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan akan tinggi, sehingga perusahaan akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya produksi.

Jumlah tenaga kerja atau penduduk bekerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yang tidak stabil dan terlihat dari persentase pertumbuhannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penanaman modal asing yang setiap tahun mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19 namun tetap melampaui target nasional, penanaman modal dalam negeri yang perkembangannya baik dan selalu meningkat, pertumbuhan ekonomi yang perkembangannya positif walaupun pada tahun 2020 berkontraksi akibat pandemi COVID-19 dan upah minimum provinsi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yaitu: (1) penggabungan beberapa variabel ke dalam model, dan (2) menjadi penelitian yang

mengangkat topik penyerapan tenaga kerja dengan variabel bebas PMA, PMDN, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum dengan tahun terkini di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT: BUKTI EMPIRIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020?
3. Bagaimana elastisitas (kepekaan) penyerapan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum provinsi di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020?
4. Apa faktor paling berpengaruh (dominan) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020.
3. Untuk mengetahui elastisitas (kepekaan) penyerapan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020.
4. Untuk mengetahui faktor paling berpengaruh (dominan) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 1999-2020 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi bagi lingkungan *civitas academica* khususnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jawa Barat dengan objek penelitian yaitu penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2021 dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2021												Tahun 2022																		
		Oktober			November				Desember				Januari				Februari				Maret				April							
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan judul	■																														
2.	Pembuatan proposal usulan penelitian		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
3.	Pendaftaran sidang usulan penelitian													■	■	■																
4.	Sidang usulan penelitian													■	■	■																
5.	Revisi usulan penelitian													■	■	■	■	■	■	■												
6.	Penyusunan skripsi dan bimbingan																■	■	■	■	■	■	■	■								
7.	Sidang skripsi dan komprehensif																												■	■	■	■
8.	Revisi skripsi																															■

